



ADB

Strategi Kemitraan Negara

Mei 2012

Indonesia
2012–2014

Asian Development Bank

NILAI TUKAR MATA UANG
(per 3 Mei 2012)

Unit mata uang	–	rupiah (Rp)
Rp1,00	=	\$0,00011
\$1,00	=	Rp9.210,00

DAFTAR SINGKATAN

ADB (<i>Asian Development Bank</i>)	–	Bank Pembangunan Asia
ASEAN (<i>Association of Southeast Asian Nations</i>)	–	Perhimpunan i Negara-Negara Asia Tenggara
CPS (<i>country partnership strategy</i>)	–	Strategi Kemitraan Negara
MDG (<i>Millennium Development Goal</i>)	–	Tujuan Pembangunan Milenium
PDB	–	Produk Domestik Bruto
PPP (<i>public–private partnership</i>)	–	Kemitraan Publik Swasta
RPJMN	–	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
TA (<i>technical assistance</i>)	–	Bantuan Teknis
UMKM	–	Usaha Mikro Kecil dan Menengah

CATATAN

Dalam dokumen ini, “\$” mengacu pada dollar AS.

Wakil Presiden	S. Groff, Operations 2
Direktur Jenderal	K. Senga, Southeast Asia Department (SERD)
Kepala Perwakilan	J.D. Lindborg, Indonesia Resident Mission, SERD
Pimpinan Tim	S. Bhandari, Principal Country Specialist, SERD
Anggota Tim	P. Aji, Economics Officer, SERD M. Alam, Unit Head, Project Administration, SERD F. Anggriani Arifin, Associate Project Analyst, SERD P. Bracey, Principal Investment Specialist, Private Sector Operations Department (PSOD) J. Coloma Brotons, Urban Development Specialist, SERD R. Budiman, Senior Financial Management Specialist, SERD M. Chaerani, Associate Project Analyst, SERD R.B. Concepcion, Regional Cooperation Specialist, SERD C.A. Engstrom, Principal Investment Specialist, PSOD B. Finlayson, Principal Infrastructure Specialist (Public Private Partnership), SERD R. Frauendorfer, Lead Urban Development Specialist, SERD E. Ginting, Senior Country Economist, SERD S. Hasnie, Principal Energy Specialist, SERD R. Hattari, Public Management Economist, SERD U. Hendrarini, Senior Administrative Assistant, SERD

K. Hee Ryu, Unit Head, Project Administration, SERD
U. Hoque, Social Sector Specialist (Gender), SERD
B. Hutagalung, Programs Officer, SERD
M. Nasimul Islam, Water Resources Specialist, SERD
P. van Klaveren, Senior Urban Development Specialist, SERD
W. Kubitzki, Principal Portfolio Management Specialist, SERD
N. LaRocque, Senior Education Specialist, SERD
T. Niazi, Principal Public Management Specialist, Regional and Sustainable Development Department (RSDD)
I. O'Donnell, Disaster Risk Management Specialist, RSDD
T. Panella, Principal Water Resource Management Specialist, SERD
H. van Rijn, Senior Public Management Specialist, RSDD
S. R. Schuster, Senior Financial Sector Specialist, SERD
G. Servais, Health Specialist, SERD
A. Sundari, Senior External Relations Officer, SERD
D. Syarifa, Associate Programs Analyst, SERD
P. Tharakan, Climate Change Specialist, SERD
R. Valkovic, Principal Transport Specialist, SERD
S. Zaidansyah, Senior Counsel, Office of the General Counsel

Tim Peninjau Ahli

M. Chatib Basri, University of Indonesia
R. Bolt, Advisor, SERD
M.E. Khan, Principal Economist, Economics and Research Department
D. McCauley, Advisor, Climate Change, RSDD
B. Nguyen, Senior Evaluation Specialist, Independent Evaluation Department
C.C. Yu, Principal Results Management Specialist, Strategy and Policy Department

Dalam menyusun sebuah strategi kemitraan negara, mendanai sebuah proyek, atau dengan menunjuk atau mengacu kepada satu kawasan atau wilayah geografis tertentu dalam dokumen ini, Asian Development Bank tidak bermaksud untuk membuat penilaian terhadap status hukum atau status apa pun dari suatu kawasan atau wilayah mana pun.

Dokumen ini telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris untuk menjangkau pengguna yang lebih luas. Meskipun ADB telah berusaha untuk memastikan ketepatan dari penerjemahan, namun, bahasa resmi Asian Development Bank (ADB) adalah Bahasa Inggris dan hanya dokumen asli yang ditulis dalam Bahasa Inggris yang merupakan teks yang otentik (resmi dan otoritatif). Segala sitiran harus mengacu ke dokumen aslinya dalam Bahasa Inggris.

DAFTAR ISI

	Halaman
SEKILAS TENTANG INDONESIA	
I. TREN-TREN DAN ISU-ISU PEMBANGUNAN	1
A. Latar Belakang Negara	2
B. Kajian dan Tinjauan Ekonomi	
C. Hal-Hal Penting dalam Strategi Kemitraan Negara Sebelumnya	3
II. STRATEGI KEMITRAAN NEGARA	4
A. Strategi Nasional Pemerintah	4
B. Strategi Kemitraan ADB-Indonesia	6
III. PELAKSANAAN STRATEGI	9
A. Parameter-Parameter Sumber Daya Indikatif	9
B. Tinjauan Program	9
IV. PENGELOLAAN HASIL	12
A. Pemantauan	12
B. Risiko	12
LAMPIRAN	
1. Kerangka Kerja Hasil Strategi Kemitraan Negara	14
2. Daftar Tautan Dokumen	16

SEKILAS TENTANG INDONESIA

Indikator Ekonomi	2007	2008	2009	2010	2011
PDB (Rp triliun)	3.950	4.949	5.606	6.436	7.427
PDB per kapita (\$, Harga berlaku)	1.917	2.238	2.330	3.047	3.560
Pertumbuhan PDB (% , dalam harga konstan)	6,3	6,0	4,6	6,2	6,5
Pertanian	3,5	4,8	4,0	3,0	3,0
Industri	4,7	3,7	3,6	4,9	5,3
Jasa	9,0	8,7	5,8	8,4	8,5
Investasi domestik bruto (% dari PDB)	24,9	27,8	31,0	32,6	32,8
Simpanan domestik bruto (% dari PDB)	27,3	27,8	33,0	33,3	33,0
Indeks harga konsmen (% perubahan per tahun)	6,4	9,8	4,8	5,1	5,4
Likuiditas (M2) (% perubahan per tahun)	19,3	14,9	13,0	15,4	16,4
Surplus anggaran secara keseluruhan (defisit) (% dari PDB)	(1,3)	(0,1)	(1,6)	(0,7)	(1,1)
Neraca perdagangan barang (% dari PDB)	7,6	4,5	5,7	4,3	4,2
Neraca transaksi berjalan (% dari PDB)	2,4	0,0	2,0	0,7	0,2
Pembayaran utang luar negeri (% dari ekspor barang dan jasa)	19,4	18,1	23,2	21,7	22,5
Utang luar negeri (% dari PDB)	32,2	30,1	31,8	28,4	27,0

Indikator Kemiskinan dan Sosial	1990	Terakhir	Tahun
Penduduk (juta)	179,1	237,6	2011
Pertumbuhan penduduk (% perubahan per tahun)	2,0	1,7	2011
Rasio kematian ibu (setiap 100.000 kelahiran hidup)	390 [1991]	228,0	2009
Angka kematian bayi (di bawah 1 tahun/setiap 1.000 kelahiran hidup)	68 [1991]	34,0	2007
Angka harapan hidup (tahun)	61,7	70,6	2008
Tingkat baca tulis pada orang dewasa (%)	81,5	91,4	2007
Tingkat partisipasi sekolah dasar (%)	88,7	95,2	2009
Tingkat kekurangan gizi pada anak (% balita)	31,0	17,9	2010
Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (%)	15,1	12,4	2011
Rumah tangga dengan akses ke air bersih (%)	37,7 [1993]	47,7	2009
Rumah tangga dengan akses ke sanitasi (%)	24,8 [1993]	51,2	2009

Lingkungan	Sebelumnya	Terakhir	Tahun
Emisi karbon dioksida (juta ton)	1.720 [2000]	2.120	2005
Emisi karbon dioksida per kapita (ton)	1,4 [2002]	1,9	2009
Kawasan hutan (% dari total kawasan lahan)	64,3 [1990]	48,8	2005
Kawasan lindung nasional (% dari total lahan)	20,6 [2005]	11,2	2009
Penduduk perkotaan (% dari total penduduk)	48,3 [2005]	50,0	2009

Portofolio ADB (pinjaman pemerintah, per 31 Desember 2011)	OCR	ADF	Total
Total jumlah pinjaman	16	16	32
Nilai pinjaman bersih (\$ juta, kumulatif)	1.769	594	2.363
Pencairan			
Total dana yang tersedia untuk dicairkan (\$ juta)	1.589	594	2.183
Jumlah yang dicairkan (\$ juta, kumulatif)	944	443	1.387
Persentase yang dicairkan (jumlah yang disalurkan/total yang tersedia)	59	75	64

() = negatif, [] = tahun ketersediaan data, ADB (*Asian Development Bank*) = Bank Pembangunan Asia, ADF (*Asian Development Fund*) = Dana Pembangunan Asia, PDB (produk domestik bruto), M2 = uang dalam arti luas, OCR (*ordinary capital resources*) = sumber daya modal umum.

Sumber: Table 2: Country Economic Indicators, Table 3: Country Poverty and Social Indicators, Table 4: Country Environment Indicators, Table 7: Portfolio Indicators, Table 9: Portfolio Implementation Status. Dalam *Country and Portfolio Indicators* (bisa diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2); ADB. 2011. *Key Indicators for Asia and the Pacific 2011*. Manila; United Nations. Millennium Development Goals Indicators. <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/>

I. TREN-TREN DAN ISU-ISU PEMBANGUNAN

A. Latar Belakang Negara

1. Indonesia adalah sebuah negara besar berpenghasilan menengah yang memiliki penduduk berusia muda, sumber daya alam yang berlimpah, dan keragamanhayati yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Indonesia mempunyai profil internasional yang terlihat jelas yaitu sebagai salah satu negara anggota yang tergabung dalam Kelompok Dua Puluh (G20), memegang peranan regional yang penting di dalam Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*), dan aktif dalam prakarsa-prakarsa regional dan global lainnya.

2. **Kemiskinan.** Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membantu mengurangi angka kemiskinan menjadi 12,4% pada 2011, dari sebelumnya sebesar 24,0% menyusul krisis keuangan Asia pada 1998.¹ Meskipun telah terjadi perbaikan pada kesenjangan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan, lebih dari separuh penduduk hidup dengan kurang dari \$2 per hari (berdasarkan paritas daya beli), dan rentan pada guncangan ekonomi yang merugikan. Sekitar 63% dari penduduk miskin tinggal di kawasan pedesaan.

3. **Pembangunan sosial.** Pencapaian-pencapaian yang stabil telah terwujud dalam indikator-indikator pembangunan manusia dan hampir semua Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) akan tercapai pada 2015.² Meskipun demikian, belum ada kemajuan dalam hal pencapaian sasaran-sasaran terkait kematian ibu (MDG 5), angka HIV/AIDS (MDG 6), dan pengelolaan lingkungan dan hilangnya keragamanhayati (MDG 7A dan 7B). Akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi dasar juga mengalami hambatan baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, dan 12,1% dari penduduk perkotaan (dua kali lipat dari yang menjadi sasaran) masih tinggal di kawasan kumuh.

4. **Gender.** Partisipasi perempuan telah meningkat, yang ditandai dengan turunnya angka pengangguran diantara perempuan dan meningkatnya rasio pejabat perempuan di instansi-instansi pemerintah dan badan legislatif.³ Meskipun kesenjangan gender telah diatasi di dalam tingkat partisipasi pendidikan dasar dan lanjutan (MDG 3), partisipasi tenaga kerja perempuan masih kurang dari dua pertiga partisipasi laki-laki.

B. Kajian dan Tinjauan Ekonomi

5. **Kinerja.** Pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan hingga menjadi 6,5% pada 2011 dan diramalkan akan tetap kuat selama 2012. Ekonomi makro dikelola dengan bijaksana dengan inflasi sedang, tingkat defisit anggaran sedang, turunnya utang publik, dan cadangan devisa yang kuat. Tantangan-tantangan yang masih akan dihadapi antara lain pengelolaan inflasi, kenaikan harga minyak, aliran modal yang tidak stabil, dan meredam risiko-risiko yang timbul dari zona euro. Untuk mencapai sasaran-sasaran pertumbuhan jangka menengah, akan diperlukan tingkat investasi yang lebih tinggi, terutama dalam infrastruktur.⁴

¹ Poverty Analysis; Country and Portfolio Indicators (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

² Country and Portfolio Indicators (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

³ Gender Analysis (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

⁴ Economic Analysis; Country and Portfolio Indicators (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

6. **Tantangan-tantangan struktural.** Meskipun pembangunan akhir-akhir ini telah berhasil meningkatkan daya saing dan mendongkrak pertumbuhan, Indonesia masih menghadapi hambatan-hambatan pembangunan, khususnya infrastruktur yang buruk, lemahnya tata pemerintahan, dan kurangnya tenaga kerja trampil.⁵ Pertumbuhan akhir-akhir ini telah didorong oleh konsumsi swasta meskipun investasi telah meningkat kuat selama 2010–2011.⁶ Meskipun telah terjadi peningkatan, iklim investasi di Indonesia masih tertinggal dari sesama negara-negara lain di tingkat regional, dan sempitnya basis ekonomi belum menghasilkan pertumbuhan yang memadai dalam peluang-peluang lapangan kerja yang produktif untuk angkatan kerja yang sedang berkembang. Meskipun tingkat pengangguran terbuka telah turun menjadi 6,6% (Agustus 2011), sepertiga dari angkatan kerja merupakan penganggur terselubung dan lebih dari 60% dari angkatan kerja secara keseluruhan berada di sektor informal.

7. **Sektor swasta.** Sektor swasta menyumbang 60% dari produk domestik bruto (PDB) dan hampir 70% dari penyediaan lapangan kerja. Kebanyakan perusahaan berupa usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang beroperasi secara informal karena tingginya biaya untuk menjalankan usaha.⁷ Sektor formal didominasi oleh sejumlah kecil konglomerat bisnis dalam negeri, badan-badan usaha milik negara, dan perusahaan-perusahaan asing. Indonesia saat ini sedang berada dalam satu ekonomi global yang semakin kompetitif dan akan memerlukan lebih banyak investasi dengan kualitas yang lebih baik untuk menghasilkan lapangan kerja yang lebih produktif.

8. **Konektivitas.** Konektivitas dalam negeri dan internasional terhambat oleh rendahnya kualitas infrastruktur Indonesia, sistem-sistem logistik yang tidak efisien, dan peraturan-peraturan yang tidak pasti dan membatasi dalam konteks desentralisasi. Ini mengurangi kelayakan banyak usaha di sejumlah besar wilayah Indonesia, menghambat pertumbuhan lapangan kerja, dan meningkatkan dampak gangguan pasokan secara tiba-tiba pada harga. Globalisasi semakin meningkatkan tekanan untuk memperkuat daya saing untuk memaksimalkan manfaat dari perdagangan internasional. Kelompok-kelompok dan daerah-daerah tertinggal perlu mempunyai akses yang lebih setara ke infrastruktur serta layanan-layanan sosial dan keuangan untuk memastikan pertumbuhan PDB dan lapangan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dan dalam jangka panjang untuk mengurangi risiko jebakan sebagai negara berpenghasilan menengah.⁸

9. **Lingkungan.** Sumber daya alam dan keragamanhayati terancam oleh penggundulan hutan dan degradasi hutan, eksploitasi sumber daya pesisir secara berlebihan, dan penggunaan sumber daya air secara tidak berkelanjutan.⁹ Perubahan iklim diperkirakan akan menimbulkan dampak merugikan pada populasi di wilayah pesisir, hasil-hasil pertanian, dan sumber daya air. Indonesia juga merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca, sebagian besar diantaranya diakibatkan oleh perubahan penggunaan lahan, khususnya penggundulan hutan. Mengarusutamakan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang menentukan dalam

⁵ Asian Development Bank (ADB), International Labour Organization, and Islamic Development Bank. 2010. *Indonesia: Critical Development Constraints*. Manila. Bab 5.

⁶ Konsumsi swasta menyumbang sebesar 46% dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dari 2005 hingga 2011; investasi menyumbang sebesar 29%.

⁷ *Private Sector Assessment* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

⁸ Jebakan negara berpenghasilan menengah mengacu kepada ketidakmampuan negara untuk beralih ke status negara berpenghasilan tinggi karena ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan negara-negara berpenghasilan rendah dengan ekonomi berputar rendah serta dengan negara-negara maju yang mempunyai ketrampilan tinggi.

⁹ *Environment Assessment* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

upaya-upaya di tingkat nasional untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak-dampak perubahan iklim di tingkat global.

10. **Tata Pemerintahan.** Tata pemerintahan yang lebih baik sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan lebih hijau, khususnya dalam konteks desentralisasi. Pemanfaatan sumber daya-sumber daya publik secara efektif dan efisien akan memerlukan (i) kemajuan lebih lanjut untuk mewujudkan kerangka kerja anggaran yang berbasis kinerja, (ii) pelaksanaan anggaran yang lebih lancar, (iii) reformasi lebih lanjut dalam pengadaan publik, (iv) upaya-upaya yang berkesinambungan untuk memerangi korupsi, dan (v) reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan fiskal.¹⁰

C. Hal-Hal Penting dalam Strategi Kemitraan Negara ADB Sebelumnya

11. Strategi kemitraan Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia untuk 2006–2009¹¹ mempunyai dua pilar: (i) mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada penduduk miskin dan berkelanjutan, dan (ii) pembangunan sosial. Tata pemerintahan yang baik dan antikorupsi ditetapkan sebagai tema-tema lintas sektor. Lima bidang keterlibatan dalam strategi tersebut adalah (i) infrastruktur dan layanan-layanan infrastruktur yang lebih baik, termasuk infrastruktur pedesaan dan regulasi sektor yang lebih baik, (ii) sektor keuangan yang lebih baik untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya dalam negeri, (iii) desentralisasi yang lebih baik, (iv) percepatan pencapaian MDG, dengan fokus pada indikator-indikator pasokan air dan sanitasi, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik, dan (v) pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang lebih kuat.

12. Secara keseluruhan strategi kemitraan 2006-2009 dinilai *berhasil*.¹² Strategi kemitraan relevan bagi kebutuhan Indonesia. Pelaksanaan strategi sejalan dengan prioritas-prioritas dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dukungan ADB membantu memperbaiki lingkungan pendukung dan kapasitas kelembagaan untuk mencapai pertumbuhan yang digerakkan oleh sektor swasta dan penyediaan layanan yang lebih baik. Meskipun demikian, dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi, pemerintah mengawasi pelaksanaan serangkaian program reformasi yang ambisius dan meminta untuk beralih ke pinjaman berbasis kebijakan sebagai modalitas utama. Volume pinjaman mencapai \$4,6 milyar selama 2006–2009 (termasuk \$1 milyar berupa dukungan pendanaan kontinjensi pada 2009 sebagai bagian dari pengelolaan risiko untuk menghadapi krisis keuangan global), yang melampaui target dalam strategi kemitraan sebesar \$3,6 miliar. Meskipun strategi kemitraan memprediksikan program bantuan teknis (*technical assistance/TA*) sebesar \$47,6 juta untuk 2006–2009, persetujuan-persetujuan untuk TA hanya sejumlah \$27,86 juta antara lain karena keterbatasan sumber daya.

¹⁰ *Sector Assessment: Public Sector Management; Risk Assessment and Risk Management Plan* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

¹¹ ADB. 2006. *Country Strategy and Program: Indonesia 2006–2009*. Manila. In this report, the country strategy and program for 2006-2009 is also referred to as country partnership strategy (CPS). See also ADB. 2010. *Country Operations Business Plan: Indonesia 2011–2013*. Manila; and ADB. 2011. *Indonesia: Country Operations Business Plan 2012*. Manila. Rencana-rencana bisnis operasi negara ini memperpanjang CPS hingga 2010 dan 2011.

¹² Validasi Tinjauan Akhir terhadap CPS sejalan dengan peringkat keseluruhan dan peringkat-peringkat untuk empat dari enam kriteria. Validasi ini tidak sejalan dengan peringkat untuk dua kriteria yaitu “penempatan posisi strategis” dan “dampak pembangunan.” Lihat *Country Strategy and Program 2006-2009 Final Review Validation*, Tabel 2, hal.11 (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

13. Tingginya proporsi pinjaman berbasis kebijakan membantu meningkatkan efisiensi penyaluran pinjaman selama kurun waktu strategi kemitraan. Bahkan tanpa termasuk pinjaman-pinjaman berbasis kebijakan, rasio penyaluran meningkat pada 2009 (22,4%), yaitu di atas rata-rata di seluruh ADB (19,5%). Restrukturisasi portofolio, meningkatnya penggunaan sistem-sistem negara, dan delegasi yang lebih besar dalam hal tanggung jawab supervisi dan operasional kepada kantor perwakilan telah menyumbang pada peningkatan efisiensi.

14. Risiko portofolio proyek secara keseluruhan adalah 8%-12% selama kurun waktu CPS. Angka ini sedikit lebih rendah dari rata-rata ADB untuk 2009. Faktor-faktor yang berdampak besar pada risiko portofolio proyek secara keseluruhan antara lain adalah: (i) keterlambatan-keterlambatan pelaksanaan proyek dalam pengadaan barang dan rekrutmen konsultan, (ii) dana pendamping yang tidak efisien, antara lain karena keterlambatan pemberian persetujuan dan pelepasan dokumen-dokumen dan dana anggaran, (iii) kompleksitas dalam pentransferan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan (iv) waktu yang diperlukan untuk membebaskan lahan dan memastikan upaya-upaya perlindungan.

15. Pembelajaran lintas sektor yang ditarik meliputi: (i) untuk mewujudkan hasil-hasil yang nyata melalui program ADB diperlukan dukungan yang fokus dan selektif, (ii) diperlukan waktu untuk melaksanakan reformasi dan untuk mewujudkan tanggapan kebijakan yang diinginkan, dan (iii) prioritas-prioritas Indonesia mengalami perubahan selama kurun waktu program sehingga ADB harus fleksibel dalam merespons pada situasi yang berubah. Keefektifan ADB dapat ditingkatkan dengan (i) menggunakan pendekatan-pendekatan program untuk membangun kemitraan dengan mitra-mitra pembangunan lainnya, (ii) mengkonsentrasikan pada bidang-bidang program tertentu yang terbatas dimana ada sinergi yang kuat antara proyek ADB dan dukungan sektor swasta, (iii) memfokuskan pada sektor-sektor inti yang diidentifikasi oleh *Strategy 2020*¹³, dan (iv) memberi penekanan pada sektor-sektor dimana ADB mempunyai catatan prestasi yang kuat dan dapat memainkan peranan katalis dengan prospek yang baik untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra lain. Usulan dalam strategi kemitraan baru mencerminkan pembelajaran-pembelajaran tersebut.¹⁴

II. STRATEGI NEGARA

A. Strategi Nasional Pemerintah

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah yang kedua untuk 2010–2014 mempunyai visi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan adil, yang didukung oleh empat strategi pembangunan yang berpihak pada penduduk miskin, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan, dan lingkungan. RPJMN 2010-2014 mengidentifikasi 11 prioritas nasional.¹⁵ Keberlanjutan lingkungan, tata pemerintahan yang baik, dan kesetaraan gender diarusutamakan di semua bidang. RPJMN 2010-2014 memberi penekanan pada tema-tema lintas sektor yaitu perubahan iklim dan konektivitas antar dan di dalam pulau-pulau di Indonesia. Kesemuanya ini diartikulasikan lebih lanjut dalam rencana induk untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 2011-2025 (rencana induk), rencana aksi nasional untuk

¹³ ADB. 2008. *Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank, 2008–2020*. Manila.

¹⁴ *Country Partnership Strategy Formulation* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

¹⁵ *Country Partnership Strategy Formulation* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

meredam emisi gas rumah kaca, strategi Indonesia untuk adaptasi perubahan iklim, dan peta jalan sektor perubahan iklim.¹⁶

17. Pertumbuhan yang inklusif. Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif melalui: (i) perbaikan infrastruktur dan logistik untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan antar daerah, dengan sinergi yang lebih baik dalam peraturan-peraturan dan program-program pembangunan pusat-daerah, (ii) pendidikan yang lebih berkualitas dan lebih relevan, (iii) satu lingkungan usaha yang lebih mendukung, (iv) akses usaha mikro dan kecil yang lebih baik ke keuangan, (v) sektor keuangan nonblank dan pasar modal yang lebih kuat, (vi) reformasi program-program bantuan sosial, dan (vii) lebih banyak pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat.

18. Pertumbuhan yang lebih hijau. Proses-proses menuju pertumbuhan yang lebih hijau harus didorong oleh (i) pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang lebih baik melalui penguatan lembaga-lembaga dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan pelestarian, dengan pendekatan-pendekatan terpadu untuk pembangunan kelautan, dan kesiapsiagaan dan respons bencana, (ii) penguatan pengendalian polusi limbah cair dan emisi dari industri, (iii) pengurangan dampak perubahan iklim dengan mengurangi penggundulan hutan dan meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan lahan gambut, dan mendorong energi terbarukan dan efisiensi energi, dan (iv) program-program adaptasi perubahan iklim meliputi pengelolaan daerah-daerah aliran sungai, risiko banjir, dan sumber daya pesisir secara terpadu. Sistem-sistem peringatan dini yang lebih baik dan meningkatnya kapasitas pengelolaan risiko bencana dirancang akan melengkapi tindakan-tindakan pengelolaan lingkungan lainnya.

19. Sasaran-sasaran ekonomi jangka menengah. RPJMN 2010–2014 memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 6,3%–6,8% per tahun, turunnya angka pengangguran terbuka hingga menjadi 5%–6% pada 2014, dan turunnya angka kemiskinan menjadi 8%–10% pada 2014. Sasaran-sasaran fiskal bersifat konservatif dengan defisit anggaran sebesar 1,2% dari PDB dan berkurangnya utang publik menjadi sebesar 24% pada 2014.¹⁷ Kebutuhan investasi untuk RPJMN 2010–2014 diperkirakan adalah sebesar Rp 12.000 triliun (\$1,4 triliun), dimana 18% diantaranya diharapkan merupakan pendanaan dari pemerintah dan sisanya dari badan-badan usaha milik negara, sektor swasta, dan kemitraan-kemitraan publik-swasta (*public-private partnerships*/PPPs). Kebijakan pinjaman luar negeri untuk proyek-proyek akan memberi penekanan pada investasi infrastruktur dan energi, termasuk melalui kemitraan publik-swasta, transfer teknologi dan pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan peningkatan penggunaan sistem-sistem negara.¹⁸

20. Kaitan dengan *Strategy 2020*. Tujuan-tujuan yang sama dalam RPJMN 2010–2014 dan *Strategy 2020* meliputi antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, proses pertumbuhan yang lebih inklusif, dan keberlanjutan lingkungan dengan penekanan pada peredaman dan adaptasi perubahan iklim (catatan kaki 15). Bidang-bidang prioritas RPJMN 2010–2014 juga tercakup sebagai bidang-bidang prioritas *Strategy 2020*, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan lingkungan. Konektivitas dalam negeri yang lebih baik, pembangunan di daerah-daerah

¹⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Master Plan: Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. Jakarta; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2010. *Peta Sektoral Perubahan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap*. Jakarta. Lihat juga *Economic Analysis; Sector Assessment: Agriculture and Natural Resources* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

¹⁷ Revisi kebijakan pinjaman pemerintah yang disusun pada 2011 menargetkan utang publik maksimal sebesar 22% dari PDB.

¹⁸ Perincian lebih lanjut tentang kebijakan pinjaman pemerintah hasil revisi bisa dilihat dalam *Country Partnership Strategy Formulation* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

tertinggal, dan kerja sama dalam bidang lingkungan dan perubahan iklim diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kerja sama dan integrasi regional. Tata pemerintahan yang baik, kesetaraan gender, dan solusi pengetahuan juga merupakan faktor-faktor pendorong *Strategy 2020*. Satu iklim investasi yang lebih baik akan meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam ekonomi. Pengelolaan utang secara bijaksana akan berdampak pada penggunaan dana secara lebih efektif dan akan memerlukan kemitraan-kemitraan yang lebih kuat dengan semua mitra pembangunan yang sejalan dengan Komitmen Jakarta (*Jakarta Commitment*).¹⁹

B. Strategi Kemitraan Negara

21. **Pilar-pilar strategi kemitraan negara.** Strategi Kemitraan Negara (CPS) untuk 2012-2014 sangat disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara besar berpenghasilan menengah. Dengan dipandu oleh komitmen pemerintah pada pembangunan yang “berpihak pada penduduk miskin, pada pertumbuhan, dan pada lingkungan”, dua pilar strategis CPS adalah pertumbuhan yang inklusif dan keberlanjutan lingkungan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (catatan kaki 15). Jangka waktu CPS selama 3 tahun selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah saat ini yang berakhir pada 2014. Jangka waktu CPS bisa diperpanjang, jika perlu, agar pilar-pilar strategis CPS tetap sejalan dengan prioritas-prioritas rencana pembangunan jangka menengah berikutnya. Pilar-pilar tersebut seiring dengan rencana induk pemerintah jangka panjang dan rencana-rencana aksi perubahan iklim.

22. **Pilar I: pertumbuhan yang inklusif.** ADB akan mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif dengan membantu untuk menghubungkan penduduk dan daerah-daerah miskin dengan pasar dengan cara memperbaiki infrastruktur, meningkatkan logistik, dan memperkuat basis ketrampilan yang diperlukan untuk mendorong investasi, produktivitas, dan lapangan pekerjaan; dan dengan memperkuat kapasitas pemerintah-pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik. Dukungan akan diberikan untuk proyek-proyek dan proyek-proyek katalis, termasuk PPP, untuk (i) mengembangkan energi, logistik transportasi, dan fasilitasi perdagangan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan dengan negara-negara tetangga, (ii) memperbaiki akses ke pasokan air dan sanitasi di kota-kota kecil yang miskin dan sejumlah kota besar yang terpilih, (iii) mengembangkan sektor keuangan nonbank untuk menggerakkan sumber-sumber pendanaan jangka panjang, dan meningkatkan akses UMKM ke keuangan dan dalam bidang-bidang perumahan dan efisiensi energi yang mulai muncul; (iv) memperbaiki pendidikan kejuruan (politeknik) untuk memenuhi kebutuhan para pemberi kerja dan industri-industri untuk mendukung rencana induk untuk mewujudkan produktivitas dan upah yang lebih tinggi, dan (v) mengembangkan infrastruktur dasar yang digerakkan masyarakat untuk masyarakat-masyarakat miskin.

23. **Pilar II: Keberlanjutan lingkungan dengan pengurangan dampak dan adaptasi perubahan iklim.** Sejalan dengan strategi-strategi pemerintah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merespons pada tantangan-tantangan perubahan iklim, ADB akan mendukung upaya-upaya untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya lahan, pesisir, dan air. Dukungan akan diberikan untuk pengembangan kapasitas dan transfer praktik-praktik baik melalui proyek-proyek yang dirancang untuk (i) menggalakkan energi terbarukan, dan efisiensi

¹⁹ Para mitra pembangunan mendukung pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan di bidang-bidang prioritas yang diidentifikasi di dalam kerangka kerja Komitmen Jakarta, satu versi lokal dari Deklarasi Paris untuk Keefektifan Bantuan (*Paris Declaration for Aid Effectiveness*). Country and Portfolio Indicators, Table 5 (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

energi, (ii) mengelola daerah aliran sungai untuk memperbaiki efisiensi penyediaan layanan air dan kualitas air, (iii) meningkatkan kualitas lingkungan melalui pasokan air dan sanitas yang lebih baik, (iv) memasukkan peristiwa-peristiwa dimana cuaca terus berubah lebih ekstrim ke dalam strategi-strategi untuk peredaman dan pengelolaan banjir, (v) mengembangkan praktik-praktik irigasi dan pertanian yang lebih tangguh terhadap peristiwa-peristiwa cuaca ekstrem, (vi) melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir dengan lebih baik, dan (vii) mendorong pemanfaatan sumber daya-sumber daya hutan secara berkelanjutan.²⁰ ADB akan memperkuat upaya-upaya untuk mengintegrasikan mitigasi risiko bencana ke dalam intervensi-intervensi pengembangan kapasitas sektor, investasi-investasi proyek yang tahan cuaca, dan selalu memenuhi standar-standar dan upaya-upaya perlindungan lingkungan yang baik.²¹ Karena penduduk miskin paling rentan pada dampak-dampak merugikan yang diakibatkan buruknya kualitas lingkungan dan perubahan iklim, pilar II juga akan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

24. **Fokus sektor dan geografi.** Dukungan ADB akan disesuaikan dengan kebutuhan, berbasis hasil, dan difokuskan pada prioritas-prioritas pembangunan yang mencerminkan keunggulan komparatif ADB di bidang-bidang khusus dalam enam sektor: (i) pertanian dan sumber daya alam, (ii) pendidikan, (iii) energi, (iv) keuangan, (v) transportasi, dan (vi) pasokan air dan sanitasi.²² Prakarsa-prakarsa pengelolaan sektor publik yang lintas sektor juga akan dimasukkan dalam program-program yang didanai ADB untuk mendukung upaya-upaya nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam kerangka kerja yang semakin terdesentralisasi. Meskipun bantuan ADB tidak akan ditujukan untuk daerah tertentu, strategi kemitraan akan memupuk sinergi antar operasi-operasi ADB dan fokus pada akses ke kelompok-kelompok miskin dan tidak beruntung ke peluang-peluang di daerah-daerah dimana ADB beroperasi untuk mendorong keinklusifan.

25. **Modalitas.** ADB akan memberikan dukungan dalam bentuk program-program untuk reformasi kebijakan, pengembangan kapasitas, investasi-investasi strategis dan katalis, beserta produk-produk pengetahuan dan layanan-layanan yang relevan. ADB akan terus mendukung pemerintah dalam melaksanakan elemen-elemen tertentu dari agenda reformasi dan pembangunan melalui pertukaran pengetahuan, dialog kebijakan yang fokus dan berwawasan, pengembangan kapasitas yang sesuai sasaran, dan intervensi-intervensi proyek yang inovatif dan bisa ditingkatkan.

26. **Fokus tematik.** ADB akan memperdalam kemitraan-kemitraan yang saat ini sedang berjalan di sektor-sektor prioritas untuk investasi, pengembangan kapasitas, dan bantuan penasihat, dan untuk mengurangi biaya-biaya transaksi yang ditanggung pemerintah dalam memanfaatkan bantuan pembangunan yang sejalan dengan Komitmen Jakarta. Kemitraan-kemitraan ini akan bersifat holistik, mengarah pada kerja sama, koordinasi dan/atau

²⁰ Fokus ini juga sejalan dengan prioritas-prioritas ADB dalam perubahan iklim: ADB. 2010. *Addressing Climate Change in Asia and the Pacific: Priorities for Action*. Manila.

²¹ ADB saat ini sedang membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengembangkan asuransi risiko bencana melalui bantuan teknis regional (ADB. 2011. *Technical Assistance for Developing a Disaster Risk Financing Capability*. Manila.) Dukungan untuk pengelolaan risiko bencana juga saat ini diberikan oleh mitra-mitra pembangunan lain seperti diacu dalam *Country and Portfolio Indicators*, Table 5 (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2). ADB saat ini juga memberikan bantuan teknis regional untuk memperkuat sistem-sistem upaya perlindungan tingkat negara di Indonesia. (ADB. 2010. *Technical Assistance for Strengthening and Use of Country Safeguard Systems*. Manila).

²² Sektor-sektor ini mewakili empat bidang utama (lingkungan, infrastruktur, pendidikan, dan keuangan) di bawah *Strategy 2020* ADB.

pembiayaan bersama sejak dari fase perencanaan dan perancangan hingga penyelesaian. ADB juga secara aktif akan berupaya menjalin kemitraan-kemitraan baru dengan mitra-mitra pembangunan, organisasi-organisasi nonpemerintah, universitas, organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya, dan sektor swasta, jika sesuai.

27. **Sektor swasta.** Dukungan untuk pengembangan sektor swasta akan ditingkatkan dengan memperkuat kolaborasi antara operasi-operasi sektor publik dan sektor-sektor swasta ADB, dan menyertakan perbaikan lingkungan usaha yang mendukung dan pengembangan kapasitas untuk mendorong proyek-proyek kemitraan publik-swasta yang memenuhi persyaratan perbankan, yang diperkuat oleh semakin pentingnya peranan sektor swasta ADB dan operasi-operasi yang tidak dijamin pemerintah. Operasi-operasi sektor swasta ADB akan diarahkan secara tepat untuk memberikan bantuan untuk (i) akses ke pendanaan untuk perumahan, energi bersih, dan UMKM, dan (ii) infrastruktur, termasuk kemitraan publik-swasta, dengan fokus pada transportasi, tenaga listrik, dan pasokan air dan sanitasi. Departemen Operasi Sektor Swasta (*Private Sector Operations Department*) ADB saat ini sedang mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman sebesar \$200 juta (dengan jaminan risiko politik sebesar \$50 juta) untuk satu proyek panas bumi, pinjaman sebesar Rp 2 trilyun untuk satu proyek jalan tol, dan pinjaman sebesar \$75 juta untuk satu proyek pembangkit listrik tenaga air pada 2012.

28. **Manajemen pengetahuan.** Selama tahun pertama pelaksanaan strategi kemitraan, Kantor Perwakilan ADB di Indonesia akan menyusun satu strategi manajemen pengetahuan selama jangka waktu implementasi strategi dengan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memprioritaskan dan mensistematisasikan dukungan dan jaringan pengetahuan. Penekanan yang lebih besar akan diberikan untuk menghubungkan pengetahuan dan keuangan dengan menghasilkan, menangkap, dan mengkomunikasikan pembelajaran-pembelajaran dan solusi-solusi pengetahuan dari operasi-operasi ADB, dan dengan pertukaran praktik-praktik baik di tingkat global dan regional sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bantuan pinjaman dan nonpinjaman. ADB akan memanfaatkan sumber daya staf dan penasihatnya untuk bisa dengan cepat merespons pada permintaan-permintaan akan penasihat tentang kebijakan yang tepat waktu. ADB juga akan bersifat fleksibel dan cepat tanggap pada permintaan-permintaan pemerintah akan bantuan penasihat di luar sektor-sektor dan tema-tema prioritas strategi kemitraan, khususnya jika ada potensi untuk menggerakkan sumber daya inkremental dari para mitra pembangunan.

29. **Tata pemerintahan dan pengembangan kapasitas.** ADB akan menargetkan dukungan pengembangan kapasitas untuk pengelolaan publik yang terdesentralisasi untuk memperbaiki tatakelola pemerintahan. ADB akan membantu memperkuat sistem-sistem pengelolaan keuangan untuk pemerintah-pemerintah daerah dan nasional dan sistem-sistem pengadaan dan audit setempat, dan kapasitas untuk perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pengelolaan keuangan di semua sektor dalam operasi-operasi ADB. Risiko-risiko fidusia akan terus dikelola di dalam operasi-operasi ADB, yang disertai pengembangan kapasitas yang tepat untuk badan-badan pelaksana dan penanggung jawab yang relevan.

30. **Kesetaraan gender.** ADB akan menargetkan kesetaraan gender di semua tahap dukungan strategi kemitraan dengan (i) melembagakan penggunaan rencana-rencana aksi gender, (ii) mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data yang terpilah menurut gender secara lebih sistematis di sektor-sektor yang menjadi keterlibatan ADB, (iii) meningkatkan kesadaran tentang gender dan mengembangkan kapasitas badan-badan pelaksana dan

penanggung jawab dalam pengarusutamaan gender, dan (iv) berkoordinasi dengan para mitra dan pemangku kepentingan lain tentang isu-isu gender.

31. **Kerjasama regional.** Mendukung prakarsa-prakarsa yang mempunyai manfaat regional yang penting yang akan mendorong kerja sama regional, termasuk (i) tenaga listrik, transportasi, dan logistik lintas batas untuk mewujudkan konektivitas di bawah rencana induk yang lebih baik; (ii) pelaksanaan rencana-rencana aksi nasional yang disusun di bawah Prakarsa Segitiga Karang (*Coral Triangle Initiative*), Prakarsa Jantung Borneo (*Heart of Borneo Initiative*), dan Program Investasi Kehutanan (*Forest Investment Program*), dan (iii) mendorong sinergi dengan dukungan penasihat regional, pengembangan kapasitas, dan investasi yang diberikan kepada ASEAN dalam rangka mewujudkan satu Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), Kawasan Pertumbuhan ASEAN bagian Timur yaitu Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Filipina (*Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area*), dan Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (*Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle*). Bantuan kebijakan, penasihat, dan pengembangan kapasitas akan terus menjadi sarana utama dalam peralihan dan adaptasi praktik-praktik baik dari negara-negara berkembang yang menjadi anggota ADB.²³

32. Strategi kemitraan ini memiliki sejumlah perbedaan yang mencolok dibandingkan strategi kemitraan sebelumnya. Pertama, strategi kemitraan ini menyertakan pertimbangan-pertimbangan perubahan iklim sebagai satu arah strategis. Kedua, ADB akan secara bertahap menyeimbangkan kembali portofolionya terhadap investas-investasi proyek. Ketiga, strategi kemitraan ini fokus pada serangkaian aktivitas hanya di enam sektor sementara strategi kemitraan sebelumnya mencakup satu pendekatan yang lebih berbasis luas di delapan sektor.²⁴

III. PELAKSANAAN STRATEGI

A. Parameter-Parameter Sumber Daya Indikatif

33. Satu alokasi indikatif sebesar \$2,5 milyar dalam bentuk sumber daya modal umum tersedia untuk pinjaman sektor publik selama 2012–2014. Sebesar \$8 juta dalam sumber daya bantuan teknis (TA) ADB diperkirakan akan tersedia untuk 2012–2014. Sumber daya-sumber daya ini akan diperkuat dengan operasi-operasi sektor swasta ADB, operasi-operasi yang tidak dijamin pemerintah, dan pendanaan inkremental untuk prakarsa-prakarsa kerja sama regional seperti Dana Infrastruktur ASEAN (*ASEAN Infrastructure Fund*). Peluang-peluang pembiayaan bersama dengan mitra-mitra pembangunan akan diupayakan untuk semakin meningkatkan pengaruh dampak bantuan ADB, untuk membangun kapasitas dan mengembangkan produk-produk pengetahuan di dalam sektor-sektor utama, dan untuk membantu mewujudkan Komitmen Jakarta.²⁵ Parameter-parameter yang sudah direvisi terkait pembiayaan bersama dan pendanaan disepakati pada Februari 2011 antara lain untuk membantu pelaksanaan

²³ Satu daftar sampel proyek-proyek bantuan teknis regional, dimana Indonesia berpartisipasi, ada di dalam *List of Selected Regional Technical Assistance Projects, 2010–2011* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

²⁴ Dua sektor - yaitu industri dan perdagangan, dan kesehatan — tidak masuk dalam CPS ini. Perbandingan tidak termasuk proyek pengelolaan sektor publik dan proyek multisektor. Proyek pengelolaan sektor publik diperlukan sebagai satu sektor yang tumpang susun dalam CPS ini. Proyek-proyek multisektor di dalam CPS ini hanya terdiri dari sektor-sektor infrastruktur, yang sudah ada di dalam daftar sektor-sektor prioritas.

²⁵ *Country Operations Business Plan* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

proyek.²⁶ Plafon sesungguhnya untuk pendanaan ADB akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan khusus proyek dan pembiayaan bersama yang tersedia. Akan diperlukan sejumlah perubahan dalam perpaduan, fokus, dan penugasan staf di kantor perwakilan ADB untuk mendukung pelaksanaan strategi kemitraan (catatan kaki 25).

B. Tinjauan Program

34. Pemerintah telah meminta ADB untuk secara bertahap beralih ke lebih banyak investasi proyek (di dalam kerangka kerja programatik) untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mengikat dalam mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya infrastruktur dan layanan-layanan terkait. Transisi menuju peningkatan dukungan terhadap proyek akan dilakukan secara bertahap dan bisa diselaraskan selama jangka waktu strategi kemitraan untuk merespons berubahnya kebutuhan-kebutuhan pemerintah akan dukungan dana dan sumber daya dan keahlian ADB.

35. Upaya-upaya bersama telah dilakukan untuk mengatasi keterlambatan-keterlambatan proyek melalui peningkatan pendelegasian proyek-proyek dan penugasan staf ke Kantor Perwakilan Indonesia, dan penguatan aksi-aksi yang disepakati dalam misi-misi tinjauan proyek secara rutin dan pertemuan-pertemuan tiga bulanan tentang pengelolaan portofolio. ADB akan terus membantu membangun kapasitas badan-badan pelaksana dan badan-badan penanggung jawab untuk memenuhi kriteria pemerintah tentang kesiapan proyek dan untuk memperbaiki kinerja portofolio. ADB akan berupaya untuk mengurangi biaya-biaya transaksi dan melakukan efisiensi dengan mendukung penggunaan sistem-sistem tingkat negara melalui penyusunan standar-standar pengadaan dan audit, serta upaya perlindungan, yang bisa diterapkan dalam operasi-operasi ADB.

36. **Modalitas pembiayaan.** ADB akan menggunakan perpaduan instrumen-instrumen pembiayaan untuk memungkinkan kepastian pembiayaan jangka panjang dan mengintegrasikan bantuan untuk program-program reformasi dan pengembangan kapasitas dengan operasi-operasi investasi. Penggunaan fasilitas-fasilitas pembiayaan multistahap, program-program pengembangan sektor, pinjaman sektor, pembiayaan retroaktif, dan dana global akan dikaji, selain juga pinjaman berbasis kebijakan, proyek-proyek investasi, dan proyek-proyek bantuan teknis (catatan kaki 25).

37. **Energi.** Keterlibatan ADB dalam sektor energi akan diarahkan oleh rencana pengembangan listrik nasional oleh pemerintah, yang bertujuan untuk “menghijaukan” sektor energi sambil memenuhi kebutuhan akan tenaga listrik dengan mendorong kemitraan pemerintah-swasta, meningkatkan efisiensi energi dan konservasi, mengarusutamakan dan meragamkan sumber-sumber energi bersih, dan mengurangi emisi karbon dioksida. Dukungan akan meliputi (i) satu fasilitas pendanaan multistahap untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, (ii) sistem-sistem transmisi dan distribusi yang lebih baik untuk mengurangi kerugian dan mendorong efisiensi sistem, mendorong perdagangan tenaga listrik lintas kawasan dan lintas batas, dan memperluas akses, dan (iii) dialog dan advokasi kebijakan yang terus menerus dengan pemerintah untuk mendorong tenaga hidro, konservasi energi, peningkatan penangkapan dan penyimpanan karbon, dan energi terbarukan yang tidak terhubung dengan jaringan sebagai satu sarana untuk meningkatkan akses energi di pulau-pulau kecil dan daerah-daerah terpencil. Operasi-operasi sektor swasta ADB juga akan memberikan prioritas untuk

²⁶ *Country Cost-Sharing Arrangements and Eligible Expenditure Financing Parameters* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi, hidro, matahari, dan angin di daerah-daerah tertinggal di Indonesia.²⁷

38. **Transportasi.** Dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas kebijakan transportasi pemerintah dan Prakarsa Transportasi Berkelanjutan (*Sustainable Transport Initiative*) ADB, fokus strategi bantuan dalam sektor transportasi akan meliputi (i) operasi berbasis kebijakan untuk membantu reformasi pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dalam negeri dan regional, (ii) perbaikan infrastruktur transportasi untuk menyediakan jaringan yang aman, efisien dan tangguh, dan (iii) pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas dengan fokus untuk meningkatkan akses sektor swasta ke pasokan infrastruktur dan operasi. Dengan bermitra dengan Badan Australia untuk Pembangunan Internasional (*Australian Agency for International Development*), ADB akan menangani isu-isu di sektor kunci, termasuk (i) keselamatan jalan, (ii) pemeliharaan jalan, pengendalian muatan, dan pemberian kontrak berbasis kinerja, (iii) pelaksanaan upaya-upaya perlindungan yang lebih baik, dan (iv) penguatan jalan agar tahan cuaca. Operasi-operasi sektor swasta pada awalnya akan fokus pada kemitraan pemerintah-swasta untuk jalan tol, dengan tujuan untuk mengembangkan model-model proyek kemitraan pemerintah-swasta yang memenuhi persyaratan bank di setiap subsektor transportasi.²⁸

39. **Keuangan.** ADB akan mendukung pelaksanaan reformasi sektor keuangan di bawah pasar modal pemerintah dan rencana induk industri keuangan nonbank untuk (i) meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar keuangan untuk memberikan akses yang luas ke pembiayaan nonbank, (ii) menggerakkan pinjaman jangka panjang melalui basis investor yang diperluas, dan (iii) menyelaraskan regulasi dengan standar-standar internasional. Operasi-operasi sektor swasta ADB dan operasi-operasi yang tidak dijamin pemerintah di dalam sektor keuangan akan mencari peluang untuk mendukung (i) teknologi-teknologi efisiensi energi dan energi bersih, (ii) pembiayaan perumahan untuk memungkinkan bank untuk memperluas pemberian pinjaman kepada segmen nasabah yang lebih luas, (iii) akses UMKM ke pembiayaan, dan (iv) pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.²⁹

40. **Pasokan air dan sanitasi.** ADB akan membantu pemerintah untuk melaksanakan rencana aksi nasional pemerintah untuk air bersih dan peta jalan untuk pengembangan sanitasi perkotaan, dan untuk mencapai sasaran-sasaran dan komitmen-komitmen MDG. Dukungan diharapkan akan meningkatkan akses yang berkesinambungan ke pasokan air yang aman dan sanitasi yang lebih baik, mengurangi polusi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. ADB akan memberikan pinjaman dan bantuan teknis untuk sanitasi di wilayah-wilayah perkotaan dan pasokan air masyarakat, termasuk melalui pengembangan fasilitas-fasilitas pasokan air dan sanitasi yang digerakkan masyarakat. ADB juga akan membantu reformasi pemerintah terhadap sejumlah penyedia pasokan air dan meningkatkan akses ke air minum yang bersih. Operasi-operasi sektor swasta dan yang tidak dijamin pemerintah akan berupaya mencari peluang untuk memberikan bantuan bagi infrastruktur dan layanan pasokan air dan sanitasi.³⁰

²⁷ *Sector Assessment: Energy; Private Sector Assessment* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

²⁸ *Sector Assessment: Transport; Private Sector Assessment* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

²⁹ *Sector Assessment: Finance; Private Sector Assessment* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

³⁰ *Sector Assessment: Water Supply and Sanitation; Private Sector Assessment* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

41. **Pendidikan.** ADB akan membangun kemitraan untuk mendukung rencana-rencana strategis pemerintah dalam sektor pendidikan dan strategi jangka panjang untuk pendidikan tinggi untuk memperkuat perencanaan dan pengelolaan, dan melakukan reformasi terhadap sistem-sistem pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi untuk mendukung rencana induk. Dukungan ADB akan berperan dalam integrasi yang lebih baik antara kebutuhan dan persediaan pasar kerja dari sistem pendidikan. Bantuan akan meliputi satu proyek untuk politeknik dan satu program bantuan teknis multimitra yang sedang berjalan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kapasitas untuk memperkuat penyusunan kebijakan, pengelolaan dan pengawasan sistem pendidikan.³¹

42. **Sumber daya alam.** Bantuan ADB akan memperkuat inisiatif-inisiatif nasional dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengurangan polusi dan degradasi lahan, dan pengembangan kapasitas untuk meredam dan beradaptasi pada perubahan iklim seperti disebutkan secara garis besar dalam peta jalan sektor perubahan iklim. Pendekatan-pendekatan program akan digunakan untuk memberikan bantuan untuk (i) memperbaiki pengelolaan banjir di sejumlah daerah aliran sungai yang sudah ditentukan, (ii) pengelolaan sumber daya air secara terpadu di daerah aliran sungai Citarum, (iii) modernisasi pengairan, (iv) perlindungan ekosistem terumbu karang dan meningkatkan penghidupan masyarakat miskin di sekitar kawasan pesisir di bawah Inisiatif Segitiga Karang, dan (v) memperkuat pengelolaan hutan di bawah prakarsa-prakarsa Jantung Borneo, Program Investasi Kehutanan, dan Mengurangi Emisi Penggundulan Hutan dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+*).³²

43. **Pengelolaan sektor publik.** ADB bertujuan untuk mendukung tata pemerintahan yang baik dan pengelolaan sektor publik dengan satu fokus pada pengelolaan keuangan publik yang terdesentralisasi. Menyusul penyediaan serangkaian pinjaman berbasis kebijakan, ADB akan terus menyediakan sumber daya bantuan teknis untuk mendukung rencana aksi nasional untuk desentralisasi fiskal. Bantuan ADB untuk memperbaiki audit dan pengadaan akan meliputi dukungan dalam penyusunan satu undang-undang pengadaan yang baru, dan khususnya di tingkat daerah, pelaksanaan pengadaan secara elektronik di badan-badan pemerintah, meningkatkan kualitas laporan-laporan audit dan tindak lanjut.³³

IV. PENGELOLAAN HASIL

A. Pemantauan

44. Hasil-hasil kerangka kerja dari strategi kemitraan akan dikaji setiap tahun agar ADB dan pemerintah bisa melacak dan mengevaluasi keberhasilan yang dicapai dan untuk menjadi masukan dalam menyusun program-program negara di masa mendatang (Lampiran 1). Kemajuan dapat dilacak dengan menggunakan sistem-sistem negara yang dilengkapi dengan supervisi proyek proyek yang akan fokus pada hasil. Kemajuan dalam pencapaian hasil-hasil jangka pendek hingga menengah akan dipantau melalui misi-misi proyek dan bantuan teknis ADB dan tinjauan-tinjauan tahunan terhadap portofolio.

³¹ *Sector Assessment: Education* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

³² *Sector Assessment: Agriculture and Natural Resources; Environment Assessment* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

³³ *Sector Assessment: Public Sector Management* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2). Dukungan ADB untuk mencapai peningkatan konektivitas juga akan membantu meningkatkan desentralisasi melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang terkoordinasikan diantara pemerintah-pemerintah daerah dan pusat.

B. Risiko

45. **Preferensi Pinjaman.** Preferensi-preferensi pinjaman pemerintah bisa berubah dan tuntutan adanya pinjaman berbasis kebijakan, khususnya, berkaitan dengan kesenjangan fiskal. Rencana bisnis tahunan akan digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap program dan segala perubahan terhadap kerangka kerja hasil, untuk memastikan bahwa program tetap sejalan dengan preferensi-preferensi pemerintah.

46. **Kesiapan proyek.** Kondisi lingkungan proyek di Indonesia ditandai dengan perubahan aturan dan ketentuan, kesulitan dalam perolehan lahan, dan persyaratan-persyaratan penerusan pinjaman yang kompleks yang harus dipenuhi pemerintah-pemerintah daerah karena keterlibatan berbagai badan pemerintah.³⁴ Satu transisi secara bertahap ke proyek-proyek, pemenuhan kriteria kesiapan proyek, penggunaan pendekatan-pendekatan programatik yang disertai kepemimpinan dan kepemilikan pemerintah, dan dukungan terhadap sistem-sistem negara akan membantu untuk memastikan efisiensi dan keefektifan investasi-investasi proyek.

47. **Tata pemerintahan.** Pengelolaan sektor publik yang lemah dapat menimbulkan risiko pada pelaksanaan.³⁵ ADB akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan sistem-sistem pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik, memperkuat undang-undang, peraturan, dan institusi pengadaan, dan membangun kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan audit internal. Langkah-langkah akan dirancang dan dimasukkan ke dalam proyek-proyek ADB untuk menangani risiko-risiko yang dihadapi setiap sektor dan membantu meningkatkan integritas dan akuntabilitas.

48. **Lingkungan ekonomi global.** Indonesia tetap rentan terhadap pergerakan-pergerakan yang tidak diharapkan dalam aliran modal dan harga-harga komoditas. Ketidakstabilan dalam aliran modal memperumit kebijakan moneter. Harga minyak internasional yang tinggi bisa memaksa pemerintah mengesahkan undang-undang tentang BBM bersubsidi dalam negeri dan mengurangi sumber daya yang semestinya diperlukan untuk program-program investasi infrastruktur yang penting dan layanan sosial serta program-program lain untuk penduduk miskin. Melonjaknya harga minyak dan pangan bisa mendorong inflasi dan menurunkan standar-standar hidup rumah tangga-rumah tangga miskin dan hampir miskin. ADB akan terus mendukung program-program reformasi jangka menengah pemerintah dan akan mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk memberikan bantuan untuk merespons pada kondisi-kondisi global yang terus berubah.

49. **Kemitraan publik-swasta.** Investasi-investasi dalam infrastruktur dan layanan dengan cara-cara yang meningkatkan partisipasi swasta merupakan hal yang sentral dalam strategi kemitraan. Risiko-risiko utama yang dihadapi meliputi ketidakmampuan pemerintah untuk menangani isu-isu pembebasan lahan, penetapan tarif, dan reformasi badan usaha milik negara, yang diperlukan untuk mendorong kemitraan publik-swasta dalam investasi infrastruktur. ADB akan terus membantu pemerintah untuk mengembangkan satu daftar proyek-proyek kemitraan publik-swasta yang laik dan akan memfokuskan dukungannya dalam dialog kebijakan dan pengembangan kapasitas di bidang-bidang yang mempunyai prospek kuat untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur.

³⁴ Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum disetujui oleh Parlemen pada Desember 2011 dan harus memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam hal pembebasan lahan.

³⁵ *Risk Assessment and Risk Management Plan* (dapat diakses dari daftar tautan dokumen di Lampiran 2).

KERANGKA KERJA HASIL STRATEGI KEMITRAAN NEGARA

Sasaran-Sasaran Pembangunan Negara			
1. Meningkatnya pertumbuhan PDB paling tidak menjadi sebesar 7% pada 2014 2. Turunnya angka kemiskinan menjadi 8%–10% pada 2014 3. Turunnya angka pengangguran menjadi 5%–6% pada 2014 4. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan dengan keragamanhayati yang kaya			
Sektor-Sektor yang Dipilih untuk Mendapatkan Bantuan ADB			
Tujuan-Tujuan Sektor Pemerintah	Hasil-Hasil Sektor yang Merupakan Kontribusi ADB dan Indikator	Bidang Intervensi ADB	Alokasi Sumber Daya ADB secara Indikatif dalam Daftar Proyek dan Prioritas-Prioritas Tematik berikutnya^a
1. Pertanian dan Sumber Daya Alam (Strategy 2020 – Bidang Utama 1: Infrastruktur; Bidang Utama 2: Lingkungan)			
Konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan penduduk sembari mengantisipasi dampak-dampak perubahan iklim	Ketangguhan dan keberlanjutan terhadap iklim untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air tawar, kelautan dan hutan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik Indikator: Meningkatnya ketersediaan air hingga 42 milyar m ³ pada 2014 (baseline: 30 milyar m ³ pada 2010) Meningkatnya produksi beras hingga menjadi 78,3 juta metrik ton pada 2014 melalui pengembangan, rehabilitasi, dan perbaikan pengelolaan irigasi (baseline: 66,3 juta metrik ton pada 2010) Secara efektif mengelola 4,5 juta hektar wilayah pengelolaan kelautan pada 2014 (baseline: 0,2 juta hektar secara efektif dikelola pada 2010)	Irigasi, drainase, dan perlindungan dari banjir; kehutanan; pengelolaan sumber daya alam berbasis air	\$390 juta, atau 16% dari total alokasi CPS dimana PSD = 26% ENV = 74% REG = 13% GEN/EGM = 100%
2. Pendidikan (Strategy 2020 – Bidang Utama 5: Pendidikan)			
Meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas baik, terjangkau dari segi biaya, relevan, dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, menegakkan etika yang mulia dan karakter nasional yang kuat	Pendidikan umum, kejuruan dan tinggi memiliki daya saing di tingkat regional dan relevan bagi kebutuhan masyarakat, usaha, dan sektor-sektor industri Indikator: Rasio pendaftaran kotor untuk pendidikan sekolah lanjutan meningkat dari 64% pada 2008 menjadi 85% pada 2014 Jumlah lulusan politeknik di lima sektor prioritas yang memasuki angkatan kerja meningkat sebesar 25% pada 2015 hingga menjadi 13.600, dimana 15% diantaranya merupakan perempuan	Pembangunan politeknik-politeknik, pengembangan analisis dan kapasitas di sektor pendidikan	\$75 juta, atau 3% dari total alokasi CPS dimana: PSD = 100% ENV = 0% REG = 0% GEN/EGM = 100%

3. Energi (Strategy 2020 - Bidang Utama 1: Infrastruktur; Bidang Utama 2: Lingkungan)			
Mencapai keamanan energi nasional yang menjamin pertumbuhan nasional yang terus berkesinambungan dan mengoptimalkan penggunaan energi alternatif seluas-luasnya	Meningkatnya dan semakin efektifnya penggunaan energi termasuk energi terbarukan Indikator: Energi terbarukan menyumbang 20% dari gabungan pembangkit listrik pada 2020 (baseline 2011: 13% termasuk pembangkit tenaga hidro berskala besar) Meningkatnya rasio elektrifikasi hingga menjadi 95% dari seluruh penduduk pada 2020 (baseline 2011: 65%)	Transmisi dan distribusi tenaga panas bumi, hidro skala kecil, listrik, pengurangan kerugian dan peningkatan efisiensi	\$653 juta or 27% dari total alokasi CPS dimana: PSD = 92% ENV = 43% REG = 49% GEN/EGM = 0%
4. Keuangan (Strategy 2020 – Bidang Utama 4: Pengembangan Sektor Keuangan)			
Mendorong sektor keuangan yang dalam, efisien dan bisa diakses untuk mewujudkan lingkungan ekonomi makro yang stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Sektor keuangan nonbank menyediakan intermediasi keuangan dengan tingkat yang lebih besar. Indikator: Aset-aset sektor keuangan nonbank meningkat hingga menjadi 65% dari PDB pada 2014 dari 60% dari PDB per 2010	Pengembangan sektor keuangan, pasar uang dan modal, asuransi, dan simpanan kontraktual	\$400 juta, atau 16% dari total alokasi CPS dimana: PSD = 100% ENV = 0% REG = 0% GEN/EGM = 0%
5. Transportasi (Strategy 2020 – Bidang Utama 1: Infrastruktur)			
Mengintegrasikan pasar dan meningkatkan akses ke layanan-layanan sosial dengan meningkatkan konektivitas di dalam dan antar pulau-pulau	Konektivitas antar pulau, dalam pulau dan antar negara yang lebih baik untuk semua, termasuk masyarakat yang lebih miskin. Indikator: Peringkat kondisi rata-rata jalan raya nasional naik dari 87% pada 2009 menjadi 94% pada 2015 Semua pulau mempunyai layanan-layanan pelayaran dan pelabuhan antar pulau yang sejalan dengan strategi nasional	Perluasan kapasitas jalan regional; reformasi logistik transportasi untuk meningkatkan konektivitas	\$658 juta, atau 27% dari total alokasi CPS dimana: PSD = 100% ENV = 16% REG = 61% GEN/EGM = 39%
6. Pasokan Air dan Layanan-Layanan Infrastruktur Daerah Lainnya (Strategy 2020 – Bidang Utama 1: Infrastruktur; Bidang Utama 2: Lingkungan)			
Meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi melalui peningkatan penyediaan layanan pasokan air dan sanitasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat	Lebih banyak penduduk bisa mengakses pasokan air dan sanitasi yang lebih baik Indikator: Proporsi penduduk yang bisa mengakses sumber air yang dilindungi secara berkelanjutan meningkat dari 48% pada 2009 menjadi 69% pada 2015 Proporsi penduduk yang bisa mengakses sanitasi dasar secara berkelanjutan meningkat dari 51% pada 2009 menjadi 62% pada 2015 30% dari staf yang dilatih dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengoperasian serta pemeliharaan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan air limbah adalah perempuan	Sistem pasokan air dan sistem sanitasi	\$228 juta, atau 9% dari total alokasi CPS dimana: PSD = 47% ENV = 100% REG = 0% GEN/EGM = 100%

ADB (*Asian Development Bank*) = Bank Pembangunan Asia, CPS (*country partnership strategy*) = strategi kemitraan negara, EGM (*effective gender mainstreaming*) = pengarusutamaan gender secara efektif, ENV (*environmental sustainability*) = keberlanjutan lingkungan, GEN (*gender equity*) = kesetaraan gender, PDB = produk domestik bruto, PSD (*private sector Development*) = pengembangan sektor swasta, REG (*regional*) = daerah/regional.
Sumber: Perkiraan ADB; Pemerintah Indonesia. 2010. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014*. Jakarta.

DAFTAR TAUTAN DOKUMEN

<http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=INO-2012>

1. Analisis Ekonomi (Rangkuman) / *Economic Analysis (Summary)*
2. Analisis Kemiskinan (Rangkuman) / *Poverty Analysis (Summary)*
3. Analisis Gender (Rangkuman) / *Gender Analysis (Summary)*
4. Pengkajian Lingkungan Rangkuman) / *Environment Assessment (Summary)*
5. Pengkajian Sektor Swasta (Rangkuman) / *Private Sector Assessment (Summary)*
6. Pengkajian Sektor (Rangkuman): Pertanian dan Sumber Daya Alam *Sector Assessment (Summary): Agriculture and Natural Resources*
7. Pengkajian Sektor (Rangkuman): Pendidikan / *Sector Assessment (Summary): Education*
8. Pengkajian Sektor (Rangkuman): Energi / *Sector Assessment (Summary): Energy*
9. Pengkajian Sektor (Rangkuman): Transportasi / *Sector Assessment (Summary): Transport*
10. Pengkajian Sektor (Rangkuman): Pasokan Air dan Infrastruktur dan Layanan-Layanan Daerah Lainnya / *Sector Assessment (Summary): Water Supply and Other Municipal Infrastructure and Services*
11. Pengkajian Risiko dan Rencana Pengelolaan Risiko (Rangkuman) / *Risk Assessment and Risk Management Plan (Summary)*
12. Indikator-Indikator Negara dan Portofolio / *Country and Portfolio Indicators*
13. Kesepakatan Negara tentang Pembiayaan Bersama dan Parameter-Parameter Pembiayaan Pengeluaran yang Memenuhi Syarat / *Country Cost-Sharing Arrangements and Eligible Expenditure Financing Parameters*
14. Penyusunan Strategi Kemitraan Negara / *Country Partnership Strategy Formulation*
15. Tinjauan Akhir terhadap Strategi Kemitraan Negara / *Country Partnership Strategy Final Review*
16. Rencana Bisnis Operasi Negara / *Country Operations Business Plan*
17. Validasi terhadap Tinjauan Akhir terhadap Strategi dan Program Negara / *Country Strategy and Program Final Review Validation*

Dokumen-Dokumen Pelengkap

18. Pengkajian Sektor (Rangkuman): Keuangan / *Sector Assessment (Summary): Finance*
19. Pengkajian Sektor (Rangkuman): Pengelolaan Sektor Publik/ *Sector Assessment (Summary): Public Sector Management*
20. Suplemen Tinjauan Akhir terhadap Strategi dan Program Negara 2006-2009 / *Country Strategy and Program 2006-2009 Final Review Supplement*
21. Kerangka Kerja Kemitraan Negara / *Country Partnership Strategy Framework*
22. Daftar Proyek Bantuan Teknis Regional Terpilih 2010-2011 / *List of Selected Regional Technical Assistance Projects, 2010-2011*